

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013 sudah dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin di Kota Padang melalui program penanggulangan kemiskinan oleh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tersebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Padang, namun ada beberapa yang menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukannya evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan teori evaluasi menurut Althaus, dari semua aspek mulai dari *input* sampai *outcomes* yang digunakan dalam pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Pada aspek *input* dalam pelaksanaannya sejauh ini sudah berjalan dengan baik, namun perbedaan jumlah anggaran pada program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan koordinator TKPK Kota Padang serta minimnya sarana prasarana pada program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) akibat minimnya anggaran yang dimiliki.

Pada aspek *process* dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) meskipun proses penginputan data oleh Dinas Kesehatan Kota Padang masih dilakukan secara manual, akan tetapi koordinasi yang dilakukan antar perangkat daerah sudah cukup baik. Hanya saja kualitas sumber daya manusia masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Berbeda dengan pelaksanaan program perbaikan Rumah

Tidak Layak Huni (RTLH) yang mana selama proses pelaksanaan program koordinasi antar pihak yang terlibat sudah baik, namun tidak dengan masyarakat sebagai penerima bantuan disebabkan metode yang masih belum sepenuhnya optimal menimbulkan perbedaan data yang diserahkan dengan keadaan data aslinya. Hal ini dapat memengaruhi efisiensi pelaksanaan program.

Aspek *output* dalam teori evaluasi menurut Althaus, dalam pelaksanaan kedua program diatas sudah dapat dikatakan baik. Salah satunya, masyarakat yang tidak mendapat bantuan kesehatan akibat tidak terdaftar DTKS dijemantani oleh program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) ini serta berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun disisi lain, kurangnya penerapan aspek *output* terhadap kebijakan yang dilaksanakan seperti metode pelaksanaan yang kurang optimal salah satunya pada proses penginputan data baik itu pada program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menyebabkan tingkat efektifitas dan efisiensi kebijakan menjadi kurang serta juga menimbulkan program menjadi tidak tepat sasaran.

Pada aspek terakhir dalam pelaksanaan kebijakan merealisasikan tujuan penanggulangan kemiskinan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang diterima, seperti bertambahnya masyarakat yang tidak terdaftar di DTKS namun status penerima bantuan kesehatan masih abu-abu memperoleh bantuan kesehatan, banyaknya rumah tidak layak huni yang

diperbaiki terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk dampak negatif yang diterima antara lain, masih ada masyarakat yang tidak menerima bantuan kesehatan akibat target sasaran tidak merata, kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, serta pendataan usulan yang akan di akomodir masih belum efektif sehingga terdapat kendala yang ditemui salah satunya data yang diberikan masyarakat berbeda dengan yang dilapangan sehingga mempengaruhi efektivitas program.

6.2. Saran

Berbagai kesimpulan yang dibuat terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan, berikut adalah beberapa saran peneliti terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) dan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang dengan Bappeda terkait perbedaan pendataan alokasi anggaran.
2. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki pada program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato perlu ditingkatkan.

3. Melakukan penginputan data penerima program Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato secara menyeluruh agar program dapat berjalan tepat sasaran serta meningkatkan efisiensi program.
4. Peningkatan metode penginputan data pada program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bertujuan meminimalisir kendala perbedaan data yang usulkan dengan di lapangan.
5. Mengevaluasi metode pendataan dari pelaksanaan kedua program tersebut agar tidak mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program kebijakan penanggulangan kemiskinan.

